



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR-RI
KE PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PADA RESES DI MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2022 - 2023**

A. PENDAHULUAN

I. Dasar Kunjungan Kerja

- a. Hasil Rapat Koordinasi diantara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Pimpinan Komisi I s/d XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.
- b. Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.
- c. Pasal 98 ayat (4) huruf f UU Nomor 17 Tahun 2014 Sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- d. Pasal 58 ayat (3) huruf f Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat.

II. Ruang Lingkup

Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI, yaitu Bidang Hukum, Perundang-undangan, HAM dan Keamanan.

III. Susunan Tim

NO	NAMA	JABATAN/FRAKSI
1.	Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M.	KETUA TIM/ WAKIL KETUA KOMISI III/F-PAN
2.	DEDE INDRA PERMANA, S.H.	ANGGOTA TIM/F-PDIP
3.	JOHAN BUDI SAPTO PRIBOWO	ANGGOTA TIM/F-PDIP
4.	NOVRI OMPUSUNGGU, S.H., M.H.	ANGGOTA TIM/F-PDIP
5.	IRJEN.POL.(PURN) DRS.H.SAFARUDDIN, M.I.Kom	ANGGOTA TIM/F-PDIP
6.	DRS.H.BAMBANG HERI PURNAMA, S.T., S.H., M.H.	ANGGOTA TIM/F-P.GOLKAR
7.	H. RUDI MAS'UD, S.E., M.E.	ANGGOTA TIM/F-P.GOLKAR
8.	BIMANTORO WIYONO, S.H.	ANGGOTA TIM/F-P. GERINDRA
9.	EVA YULIANA, M.Si	ANGGOTA TIM/F-P. NASDEM
10.	Dr. H. JAZILUL FAWAID, S.Q., M.A.	ANGGOTA TIM/F-PKB
11.	N. M. DIPO NUSANTARA PUA-PUA, S.H., M.Kn	ANGGOTA TIM/F-PKB
12.	H. SANTOSO, S.H., M.H.	ANGGOTA TIM/F-P.DEMOKRAT
13.	H. M. NASIR DJAMIL, M.Si	ANGGOTA TIM/F-PKS
14.	H. NAZARUDDIN DEK GAM	ANGGOTA TIM/F-PAN

Dalam tim kunjungan kerja tersebut juga didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi III DPR RI, Penghubung Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Mahkamah Agung.

IV. Pelaksanaan dan Obyek Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja ini dilaksanakan selama 5 (lima) hari yaitu pada tanggal 14-18 Juli 2023 di Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Adapun Pelaksanaan Kunjungan Kerja tersebut dilakukan dengan melakukan pertemuan dengan :

1. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat
2. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.
3. Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Barat Kementerian Hukum dan HAM RI.
4. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak.
5. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
6. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak
7. Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak
8. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat.

B. HASIL KUNJUNGAN KERJA

I. Penjelasan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat

a. Bidang Anggaran

1. Realisasi Anggaran Semester I Tahun 2023
 - a) Pagu Polda Kalbar tahun 2023 senilai Rp. 1.379.324.479.000,-
 - b) Anggaran terealisasi Per-30 Juni 2023 senilai Rp. 716.511.130.259,- atau 51,95 %
 - c) Sisa Rp. 662.813.348.741,- atau 48,05 %
 - d) Target PNPB dan BLU Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 197.481.427.000,- (Per-tanggal 30 Juni 2023 terealisasi sebesar Rp. 100.874.002.819,- (51,08%). • Sisa Rp. 96.607.424.181,- (47,92%)).
2. Program Prioritas Polda Kalbar 2023
 - a) Prioritas Polri 2023
 - Pagu anggaran Rp.1.533.816.000,-
 - Terealisasi Rp 703.125.700,- (45.84%)
 - Belum Terealisasi Rp 830.690.300,- (44.16%)
 - b) Prioritas Nasional 2023
 - Pagu anggaran Rp.19.535.508.000,-
 - Terealisasi Rp.6.405.654.000,- (37.79%)
 - Belum Terealisasi Rp.13.129.853.997,- (67.21%)
3. Pagu Anggaran, Rencana Strategis, & Target Awal PNPB 2024
 - a) Pagu Indikatif Polda Kalbar 2024 senilai Rp.1.322.726.184.000,
 - b) Target awal PNPB (Non-BLU) Tahun 2024 adalah Senilai Rp. 11.673.653.000,
4. Rencana Strategis & Program Skala Prioritas 2024
Prioritas Pembangunan Perbatasan Polda Kalbar di 5 Polres:
 - a) Polres Sambas, Gedung Polsek Sajingan Besar;
 - b) Polres Bengkayang, Gedung Polsek Siding;

- c) Polres Sanggau, Gedung Sentra Penegakan Hukum Terpadu Perbatasan Entikong, Gedung Polsek Entikong. Gedung Polsubsektor Entikong. Gedung Aula Dan Mess SPKT Entikong (4 Gedung);
 - d) Polres Kapuas Hulu, Gedung Polsek Puring Kencana dan Gedung Polsubsektor Badau (dua gedung);
 - e) Polres Sintang. Gedung Polsubsektor Jasa.
- b. Bidang Pengawasan
1. Tantangan Gejolak Lingkungan Strategis
 - a) Gejolak Ekonomi Global akibat Perang Rusia-Ukraina (Perlambatan Ekonomi Dunia, ancaman krisis pangan/energi, DLL
 - b) Dunia memasuki era Digital Hyperconnectivity, dan melahirkan era Citizen Journalism: "Siapa, Kapan, dan Dimanapun bisa menjadi sumber berita yg belum jelas kebenarannya..."
 - c) Bencana Alam, tantangan dan isu Perubahan Iklim, Isu terorisme, serta isu lainnya yg terus membuat ketidakpastian, baik di level Global, Regional, dan Nasional.
 2. Rencana Kerja Pemerintah di tahun 2024
 - a) 7 Program Prioritas Nasional (Ekonomi, Infrastruktur, SDM, SDA, LH, dan Polhukam).
 - b) 8 Arah Kebijakan: (Pendidikan, Kesehatan, Kemiskinan, UMKM. Transisi Energi, dlsb).
 - c) 5 Agenda Pemerintah: (Pemilu 2024, IKN, PAM Proyek strategis Nasional, Percepatan Pembangunan Prov. Papua, s.d. Forum Internasional).
 3. Harapan agar Tercapai target sasaran :
 - a) Pertumbuhan Ekonomi 5,3 % s.d. 5,7%:
 - b) Tingkat Kemiskinan 6,5 % s.d. 7,5%;
 - c) Rasio Gini 0,374 s.d. 0,377:
 - d) Tingkat Pengangguran Terbuka 5,0 s.d. 5,7;
 - e) Indeks Pembangunan Manusia 73,99 s.d. 74.02
 4. Tantangan tugas Kepolisian khususnya Polda Kalbar adalah dalam memberikan Pelayanan Pemeliharaan Kamtibmas dan Penegakan Hukum serta pengayoman kepada masyarakat.
 5. Isu Strategis Provinsi Kalimantan Barat
 - a) Karhutla / Kebakaran Hutan dan Lahan
 - b) Permasalahan Perempuan dan Anak
 - c) Konflik Perkebunan
 - d) Penyalahgunaan Subsidi Migas, Pupuk, & Bapokting
 - e) Permasalahan di Perbatasan
 - f) PETI : Pertambangan Tanpa Izin
 - g) Narkoba, Kejahatan Konvensional lainnya: C3, Penipuan, Pembunuhan, judi, dlsb.

6. Penanganan tindak pidana eksisting oleh jajaran Polda Kalbar
Total kejahatan pada tahun 2023 mencapai 3.271 kasus, terdiri dari 2.565 kasus kejahatan konvensional, 557 kejahatan transnasional, 148 kasus kejahatan terhadap kekayaan negara dan 1 kasus kejahatan kontijensi. Adapun waktu kejadian kejahatan adalah setiap 1 jam 17 menit dan 48 detik dengan resiko penduduk yang terkena 60 orang per 100.000 penduduk.
7. Penanganan isu di perbatasan negara
- a) Narkoba 2023
- Narkoba yang masuk di wilayah Kalbar mayoritas berasal dari Malaysia melalui jakur tikus di perbatasan Entikong , Aruk dan Sajingan.
 - 492 LP, 629 TSK, diseluruh Provinsi Kalbar sepanjang tahun 2023.
 - 8 LP, 19 TSK, Penanganan narkoba khusus di perbatasan.
 - Rentang usia pelaku 21 th s/d 41 th.
 - Rentang usia korban 15 th s/d 25 th.
 - Barang bukti yang diamankan berupa Sabu 65,2kg; Ganja 9,2kg; Ekstasi 8.012 butir; Obat berbahaya 1524 butir (khususnya perbatasan, sabu sebanyak 46 kg).
 - Sepanjang tahun 2023 telah dilaksanakan rehabilitasi terhadap 9 kasus dengan 16 TSK.
- b) TPPO 2023
- Polda Kalbar menduduki peringkat 1 dalam menangani TPPO
 - 43 LP, 51 TSK dan 160 korban
 - Mayoritas negara tujuan TPPO adalah Malaysia, adapun asal korban adalah Jawa Timur, NTB, NTT dan warga local Kalimantan Barat.
8. Strategi dalam meningkatkan pelayanan publik dan kamtibmas
Kapolda Kalbar mendorong seluruh personel untuk mengedepankan prinsip kerja yang dimulai dari perubahan mindset dan cara bertindak. Dalam memandang dan menyelesaikan suatu permasalahan yang ada serta diterapkan dalam tugas-tugas kepolisian, sebagai wujud transformasi Polri yang presisi dan upaya dalam meraih kepercayaan public dilakukan dengan cara :
- a) Responsif: dapat merespon dan meredefinisikan keluhan masalah yang ada di masyarakat.
- b) Partnership: Tingkatkan giat operasional serta jalin kerjasama dan kolaborasi secara multidoor dengan berbagai pihak yang terkait.
- c) Solutif: Memberikan alternative solusi dari penyelesaian masalah secara *end to end*.
9. 6 program unggulan Kapolda Kalbar
- a) Diskresi Konstruktif pada Transformasi Tata Kelola Pertambangan Emas Urgensi percepatan pemberian alternatif solusi dalam Penanganan masalah Pertambangan harus segera dilakukan, sekaligus ntuk mereduksi interlinked crime yg ada; berupa penyalahgunaan Subsidi Migas, penggunaan Merkuri yang berdampak luas, permasalahan

Lingkungan Hidup, sampai dengan kejahatan konvensional di wilayah konsesi.

b) Kontribusi Dalam Menurunkan Angka Stunting

Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengupayakan menurunkan angka stunting adalah :

- Mendorong peran aktif seluruh pihak terkait untuk menangani stunting secara serius dan masif (Pemda, BKKBN, Dinkes, Fakultas Kedokteran, dlsb), menjadikan Polri sbg orang tua asuh;
- Mendorong & Melibatkan Posyandu yang sudah ada disetiap Kelurahan/Desa Posko penanganan stunting;
- Pendampingan Tenaga Kesehatan oleh Bhabinkamtibmas & Bhayangkari pada saat pemberian Makanan sehat ber-Gizi baik secara berkesinambungan.

c) Mengubah Lahan Gambut menjadi Lahan Produktif untuk Atasi Karhutla

Langkah-langkah yang dilakukan :

- Polda Kalbar mendatangkan ahli dibidang Rekayasa Genetika Organik untuk mengubah kemampuan tanaman dan struktur tanah yang dapat memproduksi hasil berlipat ganda dan berkelanjutan. Sehingga harapannya dengan didorong pada lahan gambut masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar.
- Pilot Project di wilayah Kabupaten Kubu Raya.

d) Pencanaan Pembangunan Sentra Penegakan Hukum Terpadu di Perbatasan

Untuk menjawab isu di perbatasan dan masalah penegakan hukum adalah dengan mendekatkan pelayanan kepolisian di perbatasan, sehingga dapat melaksanakan Penegakan Hukum Terpadu secara Multidoor dengan instansi terkait.

e) Mengedepankan Pembelajaran Etika Mengemudi dan Pembuatan SIM

- Polda Kalbar akan mengalokasikan waktu bimbingan belajar di tiap Sat Lantas yang dibuka untuk umum.
- Ditlantas Polda Kalbar menyiapkan Digital Learning pada website Ditlantas Polda Kalbar, di dalamnya masyarakat dapat belajar pengetahuan tentang materi-materi berlalu lintas.

f) Proactive Recruitment dalam Penerimaan Polri

Langkah-langkah yang diambil :

- Melakukan pemetaan dan sosialisasi sejak di bangku kelas 2 SMA
- Mengoptimalkan pola sosialisasi dengan meningkatkan Literasi Digital kepada peserta Recruitment Preparatory Program;
- Mengadakan bimbingan test dan kelas belajar bersama yang dibuka bagi yang berminat.

II. Penjelasan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat

a. Bidang Anggaran

1. Realisasi Anggaran Semester I Pada Seluruh Satuan Kerja

No	Satuan kerja	Pagu	Realisasi	%
1	Kejati Kalimantan Barat	Rp. 48.808.301.000	Rp. 23.621.925.285	48,4
2	Kejari Pontianak	Rp. 16.347.622.000	Rp. 6.851.919.148	41,91
3	Kejari Singkawang	Rp. 7.454.885.000	Rp.4.241.252.130	56,89

4	Kejari Mempawah	Rp. 8.873.781.000	Rp. 4.005.889.612	45,14
5	Kejari Sambas	Rp. 6.556.381.000	Rp. 3.312.516.590	50,52
6	Kejari Sanggau	Rp. 7.580.284.000	Rp. 3.360.178.825	44,34
7	Kejari Sintang	Rp. 6.636.032.000	Rp. 3.058.115.431	46,08
8	Kejari Kapuas Hulu	Rp. 6.425.127.000	Rp. 3.179.688.835	49,49
9	Kejari Ketapang	Rp. 8.239.029.000	Rp. 3.970.846.572	48,2
10	Kejari Landak	Rp. 5.361.351.000	Rp. 3.017.978.339	56,31
11	Kejari Bengkayang	Rp. 5.886.462.000	Rp. 3.168.537.777	53,83
12	Kejari Sekadau	Rp. 5.392.335.000	Rp. 2.600.886.092	48,23
13	Cabjari Pemangkat	Rp. 3.182.622.000	Rp. 1.363/788.299	42,86
14	Cabjari Entikong	Rp.2.732.312.000	Rp. 1.107.433.308	40,54
JUMLAH		Rp. 139.476.524.0000	Rp. 66.860.956.243	48

2. Program prioritas tahun 2023

a) Satgas Pengamanan Investasi

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat membentuk Satuan Tugas Pengamanan Investasi Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat berdasarkan Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Nomor: 151/0.1/Dek.2/11/2022 tanggal 23 November 2022. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat telah melakukan peningkatan investasi dengan melakukan kegiatan pengamanan terhadap peningkatan investasi berupa 4 Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai Rp.410.353.930.473,17,- dan peningkatan investasi berupa Proyek Strategis Daerah (PSD) Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 10 proyek dengan nilai Rp.413.522.123.000

b) Pengendalian Inflasi

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat terlibat dalam pengendalian inflasi dengan melakukan Monitoring Pendampingan Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi serta Pendampingan Hukum.

c) Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

Pelaksanaan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) telah dilaksanakan dengan melakukan pendampingan dalam penggunaan produk TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) terhadap instansi yang proyek pembangunannya berada di wilayah Kalimantan Barat.

d) Jaksa Masuk Sekolah & Jaksa Menyapa

Pada tahun 2023, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat telah melaksanakan Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah sebanyak 7 (tujuh) kegiatan dengan jumlah peserta sebanyak 1.200 peserta. Untuk kegiatan Jaksa menyapa telah dilaksanakan di TVRI Kalimantan Barat pada tanggal 9 Maret 2023 dengan Narasumber Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.

e) Penerangan Hukum

Penerangan Hukum telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kegiatan dan terakhir dilaksanakan pada tanggal 13 April 2023 di Bank Kalbar Indonesia dengan jumlah peserta 300 orang.

f) Kualitas Pelayanan Publik

Adapun hasil dari pelaksanaan Survey tersebut Indeks Kepuasan Masyarakat pada Layanan PTSP yaitu 97 dengan kategori Baik dan pada Layanan Sikumbangdara Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu 93 dengan kategori Baik. Berdasarkan hasil SPAK Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) & Survey Persepsi Kepuasan Pelayanan (SPKP), Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat pada tahun 2023 memperoleh nilai 3,87 untuk SPKP dan 3,96 untuk SPAK.

g) Indeks Evaluasi AKIP

Untuk Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat berdasarkan surat Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI Nomor B-111/C.2/Cr.3/07/2023 tanggal 5 Juli 2023, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat memperoleh predikat "A" dengan hasil Evaluasi 87

3. Kebutuhan tambahan anggaran 2023

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat masih memerlukan tambahan anggaran di Belanja Pegawai sebesar Rp. 4.125.193.314,-

b. Bidang Pengawasan

1. Perkara tindak pidana khusus dan tindak pidana umum yang menjadi perhatian masyarakat, terutama yang terkait dengan optimalisasi pendapatan negara dan kesejahteraan rakyat

a) Perkara tindak pidana khusus yang menjadi perhatian masyarakat dan menghambat kesejahteraan rakyat adalah perkara tindak pidana korupsi dalam Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas PDAM Tanjung Berkat Kabupaten Mempawah TA 2021 dengan Nilai Kontrak Rp. 9.980.002.400,00 dimana sekarang dalam tahap penuntutan. Kerugian yang diakibatkan berdasarkan Penghitungan Kerugian Negara oleh auditor Kejati Kalbar adalah sebesar Rp 1.205.842. 438,46. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penyidikan dan analisa hukum diatas serta dirangkaikan dengan alat bukti keterangan Saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan para terdakwa yang diperoleh, maka dapat disimpulkan telah terdapat alat bukti yang cukup dan telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang disangkakan. Tidak ada kendala ataupun hambatan yang signifikan terkait perkara yang masih menjadi sisa. Penanganan terhadap perkara yang masih sisa masih berjalan dan dalam pendalaman untuk memperkuat pembuktian.

b) Penanganan perkara tindak pidana umum yang menarik perhatian masyarakat, terutama yang terkait dengan upaya optimalisasi pendapatan Negara dan kesejahteraan rakyat terdapat 3 perkara.

c) Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat sejak tahun 2021 – 2023 adalah sebagai berikut :

- Tahun 2021 : sebanyak 5 perkara.
- Tahun 2022 : sebanyak 39 perkara.
- Tahun 2023 : sebanyak 13 perkara.

Berdasarkan Data perkara tahap prapenuntutan pengiriman SPDP banyak yang tidak ditindaklanjuti dengan penyerahan berkas perkara tahap I, sehingga SPDP dikembalikan. Ketika Berkas Perkara diserahkan kepada Penuntut Umum selanjutnya di berikan Petunjuk dalam Formulir P-19 akan tetapi setelah 3 (tiga) bulan tidak ditindaklanjuti oleh Penyidik dengan penyerahan kembali berkas perkara sehingga SPDP dikembalikan ke Penyidik dengan Formulir SOP Form 3.

2. Kerja sama antar Lembaga

Upaya yang dibangun untuk sinergitas koordinasi dan kerjasama secara terpadu dan harmonis dengan sesama penegak hukum dan pihak lain antara lain mengadakan rapat koordinasi terkait permasalahan dan penegakan hukum sehingga dapat terus bersinergi dalam penyelesaian permasalahan hukum. Koordinasi terhadap aparat penegak hukum serta instansi lain yang terkait senantiasa dilakukan demi percepatan penanganan perkara dan produk hukum yang berkuaitas. Namun dalam beberapa koordinasi ataupun permintaan bantuan penghitungan kerugian negara sering kali menghadapi kendala terkait lamanya waktu penghitungan kerugian negara oleh BPK maupun BPKP. Salah satu alternatif yang dilakukan oleh Penyidik pada Kejati Kalbar adalah meminta bantuan penghitungan kerugian negara oleh Auditor Internal Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Kendala atau hambatan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan tugas adalah semakin kompleks dan berkembangnya permasalahan yang dihadapi Kejaksaan dan memerlukan kecepatan dalam penanganan, namun belum didukung sepenuhnya oleh:

- a) Kemampuan SDM;
- b) Harmonisasi hubungan antar lembaga hukum di lapangan, sehingga perlu peningkatan kualitas SDM dan etos kerja, pengaturan hal-hal yang secara nyata telah berkembang menjadi permasalahan di masyarakat dan koordinasi serta kolaborasi antar lembaga penegak hukum dengan tetap mengedepankan tugas dan fungsi masing-masing;
- c) Kurangnya kesadaran hukum masyarakat sehingga perlu lebih ditingkatkan pelaksanaan Penkum/Luhkum.

3. Reformasi Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat melalui fungsi pengawasan internal

Selain melakukan langkah-langkah Preventif dan Represif untuk meningkatkan mutu, profesionalisme, dan integritas moral para Jaksa di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, maka Bidang Pengawasan juga menjadi motor penggerak utama (prime mover) dan Tim Penilai Daerah (TPD) terwujudnya pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada seluruh satuan kerja, melalui penguatan monitoring yang salah satunya dilakukan melalui penyediaan media layanan berbasis teknologi informasi sehingga dapat memudahkan akses bagi siapapun untuk melakukan kontrol.

4. Reformasi birokrasi bidang pengawasan Kejati Kalbar
 - a) Bidang Pengawasan menjadi Konsultan dan Katalisator dalam pelaksanaan penilaian kinerja satuan kerja pada Kejaksaan Tinggi Se-Kalimantan Barat.
 - b) Bidang Pengawasan menjadi Tim Penilai Daerah (TPD) pada satuan kerja Kejaksaan Tinggi Se-Kalimantan Barat untuk diajukan dalam usulan predikat WBK/WBBM.
 - c) Bidang Pengawasan memiliki Auditor yang dapat membantu pelaksanaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas permintaan Penyidik dalam perkara Tindak Pidana Korupsi.
 - d) Bidang Pengawasan menjadi Tim Pelaksana Penertiban penyampaian LHKPN dan SPT seluruh Pegawai pada Kejaksaan Tinggi Se-Kalimantan Barat.

III. Penjelasan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Barat

a. Bidang Anggaran

1. Total Pagu Anggaran 2023 sebesar : Rp 249.050.370.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| a) Pagu Setjen Kanwil Kalbar | : Rp.24.125.329.000,- |
| b) Pagu Ditjen Pemasarakatan | : Rp.147.479.921.000,- |
| c) Pagu Ditjen Imigrasi | : Rp.72.055.129.000,- |
| d) Pagu Ditjen AHU | : Rp.2.426.682.000,- |
| e) Pagu Ditjen KI | : Rp.1.284.263.000,- |
| f) Pagu Ditjen PP | : Rp.375.000.000,- |
| g) Pagu Ditjen HAM | : Rp.242.882.000,- |
| h) Pagu BPHN | : Rp.917.551.000,- |
| i) BSK (Balitbangham) | : Rp.143.613.000,- |

2. Realisasi Anggaran Semester I tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal
Pagu : Rp. 96.971.117 M	Pagu : Rp. 134.971.005 M	Pagu : Rp. 17.108.248 M
Realisasi : Rp. 50.653.234 M	Realisasi : Rp. 62.791.717 M	Realisasi : Rp. 5.011.065 M.

3. Target dan Realisasi PNBPN Semester I Tahun 2023:

No	Satker	Capaian	Persen
1	Kanim Kelas I Pontianak	17.109.295.349	185,63%
2	Kanim Kelas III Ketapang	1.673.000.000	64,71%
3	Kanim Kelas II Entikong	2.974.114.158	161,04%
4	Kanim Kelas II Sanggau	6.077.518.218	290,85%
5	Kanim Kelas II Singkawang	10.837.378.916	137,16%
6	Kanim Kelas II Sambas	5.331.438.701	68,83%
7	Kanim Kelas III Putusibau	1.468.350.000	158,18%
		45.471.095.342	140,72%

Target PNBK KI Kalbar Tahun 2023 adalah Rp. 1.284.263.000. Capaian PNBK Sampai dengan 30 Juni 2023 Rp.780.467.181. atau 60% dari target yang diberikan. Target PNBK AHU Kalbar Tahun 2023 adalah Rp.7.762.900.000 Capaian PNBK Sampai dengan 30 Juni 2023 Rp.4.043.650.000 atau 52.08% dari target yang diberikan.

Kebutuhan Anggaran Yang Masih diperlukan sebesar Rp.5.171.774.000 untuk memenuhi kebutuhan renovasi ruang kerja dan Gedung sebesar Rp.4.571.774.000 dan pembelian 1 unit mikro bus sebesar Rp 600.000.000 Pagu Indikatif tahun 2024 sebesar Rp.251.968.346.000,- (Mengalami kenaikan sebesar 1,17%) Kenaikan tersebut untuk penambahan sewa kendaraan dan tenaga PPNPN.

b. Bidang Pengawasan

1. Strategi Dalam Mengurangi Permasalahan Overcrowding yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- a) Pemetaan tingkat hunian dan *overcrowded*
- b) Asesmen penempatan
- c) Optimalisasi program remisi dan integrasi
- d) Redistribusi Narapidana
- e) Penataan dan penambahan ruang hunian
- f) Kerja sama layanan kesehatan
- g) Pemerataan SDM tenaga pengamanan

2. Strategi Pembinaan dan Revitalisasi Sistem Pemasyarakatan yang Adil dan Objektif (Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022) yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- a) Optimalisasi pelayanan hak integrasi WBP
- b) Pembinaan berdasarkan asesmen resiko dan kebutuhan
- c) Penilaian Narapidana berdasarkan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN)
- d) Optimalisasi fungsi Divisi Pemasyarakatan

3. Kondisi lapas dan rutan

a) Tanah dan Bangunan

- Beberapa bangunan Lapas/Rutan tidak memenuhi standar pola bangunan berdasarkan Kepmenkumham Nomor M. 01-PR-01.01 tahun 2003 tentang pola bangunan UPT Pemasyarakatan. Contoh :
- Lapas Ketapang, Rutan Sanggau, Rutan Mempawah, Rutan Bengkayang, Rutan Putussibau, dan Rutan Sambas
- Tembok Keliling Rutan Landak Roboh
- Status kepemilikan tanah Rutan bengkayang belum di serahkan oleh Pemerintah daerah sejak tahun 2004

b) Sarana dan Prasarana

- Kurangnya sarana Pengamanan (Senjata Api, PHH, APAR, CCTV, Xray, Metal Detector)
- Kurangnya sarana dan prasarana Kesehatan (Ambulan, alat kesehatan)

- c) Sanitasi
 - Sebagian Besar Lapas dan Rutan bersumber dari Air tanah, air sungai, Air hujan, sehingga kurang layak
 - Saat ini kami sedang melakukan uji laboratorium terhadap kualitas air di lapas dan rutan
 - Mengajukan pengadaan Instalasi Pengelolaan Air bersih dan Limbah (IPAL)
 - d) Konsumsi
 - Semua dapur lapas dan rutan sudah laik Hygiene
 - Pengelolaan makanan sesuai dengan permenkumham No 40 tahun 2017
 - Monitoring dan pengawasan melalui aplikasi SIMONEVBAMA (Sistem informasi Monitoring dan Evaluasi Bahan Makanan)
4. Upaya Pencegahan Barang Ilegal
- a) Implementasi 3 Kunci Masyarakatan Maju (Deteksi dini, Berantas Narkoba, Sinergi dengan APH) dan Back to Basic
 - b) Penguatan Petugas pengamanan
 - c) Komitmen bersama Zero Halinar.
 - d) Optimalisasi Fungsi Intelejen
 - e) Masyarakatan.
 - f) Optimalisasi fungsi Satopsatpatnal
 - g) Punishment dan Reward
5. Strategi Peningkatan Kecepatan dan Kualitas Layanan Publik :
- a) Layanan Hukum
 - Optimalisasi Aplikasi SILANOK (Sistem Informasi Pelayanan Pelaporan Notaris Kalbar)
 - Peningkatan Pengelolaan JDIH
 - Pencetakan Sertifikat Apostille di Kanwil
 - Penyuluhan Hukum secara massif, daring, dan luring
 - b) Layanan KI
 - Peningkatan Kualitas Pelayanan KI on site
 - Pembentukan Sentral KI melalui MOU/PKS
 - Diseminasi Merek, Cipta, Paten, Indikasi Geografis
 - Sertifikasi Pusat Perbelanjaan
 - Penyebaran Informasi KI melalui Media Sosial
 - c) Layanan Paspor :
 - M-Paspor
 - UKK Mempawah menjadi Kanim
 - Mal Pelayanan Publik (MPP) Kanim Sanggau (Kab. Sanggau) dan Kanim Pontianak (Kab. Kubu Raya)
 - Eazy Passport
 - Pelayanan Ramah HAM
 - Layanan Percepatan Paspor selesai pada 1 hari yang sama
 - Pelayanan Jemput Bola dalam Hal
 - Pengurusan Pas Lintas Batas (PLB)

- d) Keimigrasian
Sering dilakukan sosialisasi kepada masyarakat wilayah perbatasan terkait keluar masuk lalu lintas orang ke dan dari Indonesia dengan menggunakan paspor atau Pas Lintas Batas (PLB) dan melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) maupun Pos Lintas Batas Tradisional (PLBT).
- e) Pelayanan Hukum dan HAM
- Aplikasi SIAMORA
 - Pelayanan Publik Berbasis HAM
 - Pelayanan Pengaduan Dugaan Pelanggaran HAM (Yankomas)
 - Pembuatan Videografis
 - Desa / Kelurahan Binaan Sadar Hukum
 - Sinergitas dengan Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi
 - Bantuan Hukum/Konsultasi Hukum
 - Sosialisasi UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
 - Aplikasi SIDBANKUM
 - Diseminasi Penjaringan OBH
 - Pemberian bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin
 - JDIH/Perpustakaan SDM Pustakawan dan Arsiparis
6. Kerjasama Kanwil dengan Pihak Terkait yang telah dilakukan
- a) Melalui Timpora tingkat Propinsi
 - b) Komunitas Intelijen daerah Propinsi Kalbar
 - c) Koordinasi Bersama Kementerian Tenaga Kerja, BP2MI, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pariwisata Propinsi Kalimantan Barat
 - d) Kerjasama pencegahan dan penangkalan Bersama APH melalui aplikasi E-Cekal
 - e) Kerjasama dengan Disdukcapil Propinsi dan kabupaten/Kota

IV. Penjelasan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak

- a. Bidang Anggaran
 1. Pagu Anggaran tahun 2023
 - a) Total pagu tahun 2023 sebesar Rp 80.408.381.000,00
 - b) Jumlah tersebut adalah realisasi anggaran seluruh satuan kerja di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Pontianak.
 2. Kebutuhan Prioritas
 - a) Sarana prasarana penunjang aktivitas perkantoran : Laptop, printer, AC, meubeleir
 - b) Sarana prasarana penunjang pelayanan: Ruang tunggu
 - c) Sarana gedung yang tidak memadai : Gedung kantor Pengadilan yang sudah tidak memadai untuk pelayanan masyarakat (PN Pontianak dan PN Sanggau). Tidak tersedia rumah dinas untuk Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim (PN Ngabang dan PN Sanggau)

3. Kebutuhan Untuk Hakim
 - a) Sewa rumah hakim untuk wilayah Kalbar hanya Rp972.000,00 per bulan
 - b) Uang transportasi di wilayah Kalbar hanya Rp45.000,00/hari (di daerah lain mencapai Rp143.000,00)
 - c) Perlu diberikan uang insentif untuk penyelesaian perkara

4. Sumber daya manusia
 - a) Kekurangan SDM hampir di semua Sat Kerja di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Pontianak
 - b) Diperlukan anggaran untuk peningk kualitas SDM melalui Bimtek, Pelat (Anggaran Bimtek tahun ini justru dihapuskan)
 - c) Perlu peningkatan Tunjangan kepanite (untuk Tunjangan Panitera Pengganti di PT Rp460.000,00 sedangkan di tingkat PN Rp360.000,00)

5. Pagu anggaran tahun 2024

Pagu Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp.77.432.626.000,00 dengan rencana strategis sebagai berikut :

 - a) Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu
 - b) Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
 - c) Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu
 - d) Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
 - e) Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
 - f) Persentase Laporan atau dokumen Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, yang diselesaikan tepat waktu secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien
 - g) Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran yang tepat, efektif dan transparan
 - h) Persentase laporan atau dokumen pengelolaan, perawatan dan pemeliharaan
 - i) Gedung, sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan Peradilan yang diselesaikan tepat waktu secara transparan, efektif dan efisien
 - j) Persentase Laporan atau dokumen pelaksanaan Kegiatan TURT seperti urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan yang diselesaikan tepat waktu secara transparan, efektif dan efisien
 - k) Persentase Laporan atau Dokumen Rencana Program dan Anggaran yang dibuat serta diselesaikan tepat waktu secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien
 - l) Persentase Laporan atau dokumen pengelolaan kepegawaian dan Pengembangan SDM yang diselesaikan tepat waktu secara transparan, efektif dan efisien
 - m) Persentase Laporan atau dokumen Pelaksanaan Pengelolaan Teknologi Informatika dan Statistik yang diselesaikan tepat waktu secara transparan, efektif dan efisien.
 - n) Persentase Laporan atau dokumen Pembinaan, Pemantauan dan evaluasi
 - o) Pimpinan yang diselesaikan tepat waktu secara transparan, efektif dan efisien.

- p) Persentase Laporan atau dokumen Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pimpinan yang diselesaikan tepat waktu secara transparan, efektif dan efisien.
- q) Persentase Publikasi Putusan Banding pada Direktori Putusan yang tepat waktu

6. Kebutuhan yang belum terpenuhi di dalam Pagu 2024 :

- a) Anggaran pembentukan Pengadilan Negeri Kubu Raya
- b) Anggaran pembangunan gedung Pengadilan Negeri Pontianak yang sudah tidak memadai karena sempit

b. Bidang Pengawasan

1. Perkara yang menonjol

TEMPAT	TAHUN PUTUS	PERKARA
PN SAMBAS	2022	Menarik perhatian karena Terdakwa merupakan kerabat pemuka adat suku Dayak sehingga pada saat persidangan massa yang terdiri dari masyarakat adat suku Dayak beramai-ramai mendatangi Pengadilan Negeri Sambas, terlebih lagi setelah pembacaan Putusan ada amar yang menyebutkan agar terdakwa segera dibebaskan namun karena Penuntut Umum langsung mengajukan upaya hukum maka Penuntut Umum merasa Terdakwa tidak bisa dibebaskan dan perlu tetap berada di tahanan sehingga sempat memicu emosi masyarakat adat suku Dayak.
	2022	Menarik perhatian publik karena Terdakwa diputus bebas oleh Majelis Hakim. Perkara berakhir di tingkat Kasasi dengan Putusan "Menolak Permohonan Kasasi Penuntut Umum".
PN SINTANG	2022	DALAM REKONVENSİ: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi-Pembanding seluruhnya; 2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi-Pembanding tidak ada hubungan hukum dan atau sebab akibat dengan kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud perkara a quo; 3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti melakukan kegiatan usaha yang menyebabkan kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud perkara a quo; 4. Menyatakan kebakaran lahan milik Penggugat Rekonvensi terjadi dikarenakan oleh faktor alam (force mayor); 5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berupa lalai menjalankan fungsi kewenangan dan pengawasannya terhadap tindakan antisipatif dan preventif, penyelamatan terhadap kebakaran lahan milik Penggugat Rekonvensi; 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.225.000.000.000,-/tahun (dua ratus dua puluh lima milyar rupiah pertahun) dan jika dikalikan 2 (dua) tahun (2019- 2021) menjadi Rp.450.000.000.000,-(empat ratus lima puluh milyar rupiah);
PN MEMPAWAH	2023	Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara Waktu Tertentu (4 Bulan), Pidana Denda Rp. 50.000.000,00 Subsider

		<p>Kurungan (3 Bulan) dan Lain-lain (menetapkan Pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada Perintah dalam Putusan Hakim karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun, dengan:</p> <p>a. <u>Syarat umum</u>: -tidak boleh melakukan suatu tindak pidana selama masa percobaan, dan</p> <p>b. <u>Syarat khusus</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tidak boleh aktif turut serta dalam kegiatan, kepanitiaan, dan struktur organisasi masyarakat adat dan budaya Melayu Bugis yang masih bagian dari Kerajaan Amantubillah Kabupaten Mempawah selama 1 (satu) tahun ; dan - perintah kepada Terdakwa untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Dr. Ir. Mardan Adijaya, M.Sc. selaku Raja Mempawah ke XIII beserta keluarganya disampaikan secara terbuka pada media massa dengan ruang lingkup siarnya setidak-tidaknya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Mempawah baik melalui media cetak maupun media elektronik selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap.
--	--	---

2. Hambatan Eksekusi di Pengadilan Wilayah Hukum Kalimantan Barat

- a) Upaya Hukum
- b) Gugatan
- c) Biaya pengamanan eksekusi
- d) Administrasi tidak lengkap
- e) Kelambatan dalam proses penilaian objek lelang

3. Program Peningkatan Integritas dan Kapasitas SDM

- a) Melaksanakan pengawasan secara berjenjang secara rutin setiap bulan
- b) Melakukan pengawasan dan pembinaan ke daerah minimal 2x setahun diselesaikan dengan anggaran
- c) Melaksanakan program pengawasan yg telah ditentukan oleh Mahkamah Agung
- d) Sosialisasi dan pembinaan internal terhadap aturan atau regulasi terbaru yg berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi pengadilan

V. Penjelasan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak

a. Bidang Anggaran

1. Pagu anggaran tahun 2023

- a) Pada tahun anggaran 2023, wilayah Pengadilan Tinggi Agama Pontianak mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 87.095.305.000,- dengan rincian DIPA 005.01 sebesar Rp. 85.297.755.000 dan DIPA 005.04 sebesar Rp. 1.797.550.000,-
- b) Dalam pelaksanaan anggaran hingga semester I TA 2023 ini, wilayah Pengadilan Tinggi Agama Pontianak telah berhasil merealisasikan anggaran sebesar 40.075.040.885 atau (51,53%) dengan rincian 39.096.075.828 atau (48,43%) untuk DIPA 005.01 dan 978.965.057 atau (54,62%) untuk DIPA 005.04.

2. Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM Berkelanjutan
 - a) Optimalisasi Administrasi Perkara Secara E-Court
 - b) Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum
 - c) Optimalisasi Mediasi
 - d) Optimalisasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan
 - e) Penguatan Pembinaan dan Pengawasan
 - f) Peningkatan Kualitas SDM
 - g) Tenaga Teknis dan Non Teknis

3. Pagu indikatif tahun 2024

Berdasarkan Pagu Indikatif TA 2024, wilayah Pengadilan Tinggi Agama Pontianak mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 87.145.137.200,- yang terdiri dari DIPA 005.01 Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 85.245.812.200,- dan DIPA 005.04 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sebesar Rp. 1.899.325.000,-.

4. Program skala prioritas tahun 2024

- a) Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Bengkayang dan Pengadilan Agama Sungai Raya.
- b) Peningkatan Kelas Pengadilan Agama Sambas Kelas I B menjadi Kelas I A, Pengadilan Agama Ketapang Kelas II menjadi Kelas I B dan Pengadilan Agama Sungai Raya Kelas II menjadi Kelas I B
- c) Pembentukan Pengadilan Agama Baru terutama di Kabupaten Landak, Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Kayong Utara
- d) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kaum Disabilitas
- e) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

b. Bidang Pengawasan

1. Rekapitulasi perkara pengadilan tingkat pertama tahun 2023

Diterima	4466 perkara
Minutasi	3921 perkara
Diputus	3921 perkara
Sisa	545 perkara

Dari perkara perkawinan tersebut diatas, perkara perceraian masih mendominasi perkara yang diterima di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Pontianak. Namun yang menarik adalah sejak di amandemen undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah menjadi undang-undang nomor 16 tahun 2019 telah peningkatan perkara Dispensasi Kawin yakni pengesahan pernikahan yang Pemohon/Termohon masih dibawah umur.

2. Rekapitulasi perkara pengadilan tingkat banding tahun 2023

Diterima	18 perkara
Minutasi	15 perkara
Diputus	15 perkara
Sisa	3 perkara

Semua perkara berhasil diputus kurang dari 1 bulan (paling lama diputus dalam waktu 29 hari). Pada hari itu juga berkas sudah dikirim ke pengadilan pengaju. (*one day minute, one day publish and one day send*).

3. Rekapitulasi perkara eksekusi tahun 2023

Permohonan Eksekusi	3 perkara
Selesai	2 perkara
Proses Pelaksanaan Eksekusi	1 perkara

Permasalahan Eksekusi : Luas tanah yang terdapat pada sertifikat tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Terkendala dalam sisi keamanan. Dalam hal eksekusi anak, anak telah di bawa lari oleh termohon ketika pelaksanaan eksekusi Pemohon eksekusi tidak hadir saat pelaksanaan eksekusi.

4. Kerjasama dengan Komisi Yudisial

- a) Selama kurun waktu tahun 2022 - 2023, di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tidak terdapat aparat Peradilan Agama yang diadakan ke Komisi Yudisial.
- b) Antara Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dengan Komisi Yudisial telah terjalin komunikasi dan koordinasi yang sangat baik dimana pada tahun 2023 ini, Komisi Yudisial mengadakan kegiatan pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH di Pontianak dengan mengikutsertakan para hakim dari Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.
- c) Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI terus berupaya melakukan pembinaan dan pengawasan baik secara offline maupun online dengan memanfaatkan teknologi informasi.

VI. Penjelasan Ketua PTUN Pontianak

a. Bidang Anggaran

1. Realisasi anggaran sampai dengan bulan Juni tahun 2023

a) DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam Tahun Anggaran 2023 telah menerima alokasi anggaran sesuai dengan DIPA Nomor : SP DIPA 005.01.2.531851 / 2023 tanggal 30 Nopember 2022 sebesar Rp. 7.192.407.000,- yang terdiri dari 2 (dua) program yaitu :

- Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
- Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Kedua Program tersebut di atas terdiri dari beberapa Kegiatan dan Sub – Sub kegiatan dan telah dilaksanakan sejak awal bulan Januari 2023 sesuai dengan jadwal kegiatan pelaksanaan anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tahun Anggaran 2023.

b) DIPA (05) Dirjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam Tahun Anggaran 2023 telah menerima alokasi anggaran sesuai dengan DIPA Nomor : SP DIPA

- 005.05.2.531852 / 2023 tanggal 30 Nopember 2022 sebesar Rp. 36.040.000,- (tiga puluh enam juta empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) Program yaitu : Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

Program tersebut di atas terdiri dari beberapa Kegiatan dan Sub- Sub kegiatan dan akan dilaksanakan sejak awal bulan januari 2023 sesuai dengan jadwal kegiatan pelaksanaan anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tahun Anggaran 2023.

2. Kebutuhan anggaran yang masih diperlukan dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak.

- a) Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak memiliki 2 (dua) bangunan gedung kantor yang terpisah didalam satu area tanah, yaitu bangunan gedung kantor depan seluas 1700 M2 di bangun mulai tahun 2009 sampai dengan 2012 (dalam rangka Prototype Mahkamah Agung RI) dan bangunan gedung kantor belakang seluas 1.056 M2 dibangun tahun 2007 sampai dengan 2008 dengan kondisi bangunan belum selesai dibangun karena tidak mendapatkan penambahan alokasi anggaran untuk melanjutkan pembangunan tersebut, padahal setiap tahun Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak selalu mengusulkan biaya renovasi gedung tersebut. Kondisi bangunan gedung kantor belakang tersebut rusak dan selalu menjadi permasalahan atau temuan jika ada Pengawasan dari Pengadilan Tingkat Banding.
- b) Permasalahan rumah dinas, Kondisi Rumah Dinas Satker Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak saat ini sangat memperhatikan, banyak terdapat kerusakan pada beberapa struktur bangunan seperti pada kolom, ring balok dan atap. Selain itu juga terdapat kerusakan pada lantai karena struktur tanah turun sehingga keramik pecah, plafond, jaringan listrik, pintu dan jendela.
- c) Permasalahan kendaraan dinas, untuk saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sangat membutuhkan penambahan kendaraan dinas roda empat dan roda dua, karena Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada saat ini hanya memiliki 2 (dua) unit kendaraan dinas roda empat yaitu mobil Vios Tahun 2006 dan Mobil Kijang Inova Tahun 2011 dengan kondisi rusak ringan dan sudah lebih dari 15 (lima belas) dan 10 (sepuluh) tahun penggunaan. Serta 4 (empat) unit kendaraan dinas roda dua dengan kondisi rusak ringan dengan masa penggunaan lebih dari 15 (lima Belas) tahun.

3. Pagu anggaran tahun 2024

- a) DIPA (01) Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung dan DIPA (05) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung
- b) Pagu anggaran Tahun 2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berdasarkan Matriks pagu indikatif tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - Pagu indikatif DIPA (01) Badan Urusan Administrasi (BUA) MA RI tahun 2024 sebesar Rp. 6.624.494.000,-

- Pagu indikatif DIPA (05) Ditjen Badilmiltun MA RI tahun 2024 sebesar Rp. 42.410.000,- .

4. Program yang akan menjadi skala prioritas

Program yang akan menjadi skala prioritas adalah Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Pelaksanaan Pengamanan Sidang pada DIPA (05) Ditjen Badilmiltun MA RI dalam menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2024.

b. Bidang Pengawasan

1. Keadaan Perkara Masuk dari tanggal Januari 2022 sampai dengan Juni 2023

Perkara masuk	59 Perkara	
Perkara diselesaikan	45 Perkara	
	Perkara Cabut	13 Perkara
	Perkara Dismissal	4 Perkara
	Perkara Inkracht	15 Perkara
Sudah diselesaikan Tk I	Dan belum Inkracht (Dalam Upaya Hukum)	13 Perkara
SISA	14 Perkara	

2. Perkara yang menonjol

Sejak tahun 2022 sampai dengan Juni 2023, sebagian besar Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak memeriksa dan memutus perkara terkait sengketa pertanahan akibat terbitnya sertifikat hak atas tanah. Dari 59 Perkara di Tahun 2022 dan 2023, 39 Perkara diantaranya merupakan perkara sengketa pertanahan.

3. Permasalahan eksekusi

- Bahwa yang terkait objek sengketa di PTUN (Perkaranya sudah diputus oleh PTUN) dalam proses penyidikan Kepolisian ataupun dalam Penyitaan Kejaksaan sehingga menghambat proses pelaksanaan eksekusi.
- Bahwa terkait perkara di PTUN (dan sudah diputus) kemudian diperkarakan kembali di Peradilan Umum sehingga menghambat proses pelaksanaan eksekusi.

4. Identifikasi permasalahan dalam proses eksekusi

- Bahwa Ketua Pengadilan terkait dengan pelaksanaan eksekusi hanya menjalankan fungsi pengawasan (Pasal 119 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Sedangkan pelaksana eksekusi tetap berada pada Tergugat (termohon Eksekusi)
- Bahwa Pemohon Eksekusi maupun Termohon Eksekusi tidak melaporkan ke Pengadilan tentang pelaksanaan eksekusi, sehingga pengadilan tidak mengetahui apakah sudah terlaksana atau belum pelaksanaan eksekusi tersebut dan tidak mengetahui apabila ada hambatan.
- Bahwa terhadap putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), sebagian besar para pihak tidak mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan.

VII. Penjelasan Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak

a. Bidang Anggaran

1. Anggaran tahun 2023

- a) Anggaran DIPA tahun 2023 Pengadilan Militer I-05 Pontianak terdiri dari DIPA (01) Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung dan DIPA (05) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.

Realisasi DIPA (01) BUA MA RI

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.585.378.000	1.320.453.462	1.264.924.538
2	Belanja Operasional Perkantoran	1.323.901.000	650.684.274	673.216.726
3	Belanja Modal	357.000.000	357.000.000	0
TOTAL		4.266.279.000	2.328.137.736	1.938.141.264
Realisasi: Rp. 2.328.137.736,- / 54.57%				

Realisasi DIPA (05) DITJEN BADILMILTUN MA RI

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
1	Belanja Operasional	41.810.000	18.245.000	23.565.000
2	Sidang Keliling	40.000.000	40.000.000	0
TOTAL		81.810.000	58.245.000	23.565.000
REALISASI : Rp. 58.245.000,- / 71.20%				

2. Kebutuhan Anggaran yang masih di perlukan dalam upaya Optimalisasi Tugas dan Fungsi

Dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsi diperlukan penambahan pagu anggaran untuk pelaksanaan sidang keliling karena wilayah hukum yang luas meliputi wilayah Propinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari 2 (dua) Kota dan 12 (dua belas) Kabupaten dan terdapat tiga Kabupaten yang bisa di jangkau menggunakan transportasi pesawat udara yakni Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu.

3. Pagu anggaran tahun 2024

Pagu anggaran Tahun 2024 terdiri dari DIPA (01) Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung sebesar Rp 3.615.461.000,- dan DIPA (05) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung sebesar Rp 100.335.000,-

4. Program skala prioritas

Program yang menjadi skala prioritas yaitu pada Program Dukungan Manajemen (005.01.WA.1071) berupa Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung yakni Pembangunan Rumah Negara Gol I C Permanen, alasan skala prioritas karena dibutuhkan kesempatan pertama untuk Rumah Dinas Jabatan Panitera dan Sekretaris Pengadilan Militer I-05 Pontianak. Pada saat ini Pengadilan Militer I-05 Pontianak memiliki Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I seluas 4.709 terletak di Jalan Ahmad Yani II Kabupaten Kubu Raya, di atas tanah tersebut baru tersedia bangunan Rumah Dinas Jabatan Kepala, Wakil Kepala dan Mess Hakim Militer.

b. Bidang Pengawasan

1. Klasifikasi Perkara Pidana Per Tanggal 11 Juli 2023

Desersi	: 21 Perkara
KDRT	: 1 Perkara
Kejahatan Thdp Kesusilaan	: 2 Perkara
Penipuan	: 1 Perkara
Kecelakaan Lalin dan Angkutan Jalan	: 2 Perkara
Kawin Ganda	: 1 Perkara
Narkotika	: 1 Perkara
Tidak Hadir Tanpa Ijin	: 1 Perkara
Jumlah	: 30 Perkara

Perkara yang paling banyak ditangani adalah perkara desersi. Terkait identifikasi permasalahan yang menjadi hambatan dalam proses eksekusi, Perkara In Absentia merupakan salah satu permasalahan yang menjadi hambatan dalam proses eksekusi. Ciri utama tindak pidana desersi ditunjukkan dengan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin seorang militer pada suatu tempat yang ditentukan baginya, dimana ia seharusnya berada untuk melaksanakan kewajiban dinas. Dalam hal tersebut kemungkinan Terdakwa sudah melarikan diri dan perkara tersebut dapat di eksekusi apabila Terdakwa telah diketemukan, dalam hal ini Polisi Militer dan Oditurat Militer yang memiliki wewenang untuk melakukan pencarian Terdakwa.

2. Program peningkatan integritas

- a) Penandatanganan Pakta Integritas oleh Hakim dan Aparatur Pengadilan.
- b) Pembinaan kepada para Hakim dan Aparatur Pengadilan terkait Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7, 8 dan 9 tahun 2016.
- c) Mengikuti sosialisasi Integritas melalui zoom meeting dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang di ikuti oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan dan Jajarannya.
- d) Kadilmil I-05 Pontianak melaporkan Penegakan Disiplin Kerja Hakim Kepada Pengadilan Militer Tinggi I Medan setiap bulan
- e) Kadilmil I-05 Pontianak melaksanakan Pengawasan Melekat yaitu pengawasan secara terus menerus yang dilakukan oleh Kadilmil I-05 Pontianak terhadap bawahannya secara preventif dan represif.
- f) Dalam rangka melakukan pencegahan gratifikasi di Pengadilan, setiap 2 (jam) sekali pada jam kerja unit kerja memperdengarkan audio himbauan tentang pencegahan gratifikasi kepada pengguna layanan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak

VIII. Penjelasan Kepala BNNP Kalimantan Barat

a. Bidang Anggaran

1. Anggaran 2023

Pagu Anggaran	: 23.959.148.000
Blokir <i>Automatic</i> (Aa)	: 846.173.000
Pagu Netto	: 23.112.975.000
Optimalisasi Tukin	: 678.744.000
Pagu Netto Setelah Optim	: 22.359.855.000

2. Program Prioritas Tahun 2023
 - a) Ketahanan Keluarga Anti Narkoba
 - b) Pembentukan Remaja Teman Sebaya
 - c) Pelatihan Softskill SMP/SMA Sederajat
 - d) Intervensi Berbasis Masyarakat
 - e) Desa Bersinar
 - f) Kab/Kota Tanggap Ancaman Narkoba

3. Kebutuhan anggaran BNNP Kalbar dan jajaran tahun 2024

PROGRAM	KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	JUMLAH
Pencegahan Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkoba	Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	400 keluarga	7.000.000	2.800.000.000
	Soft Skill/Pembentukan Teman Sebaya	40 sekolah	140.000.000	5.600.000.000
	Desa Bersinar	80 desa/kelurahan	67.780.000	5.422.400.000
	IBM (intervensi Berbasis Masyarakat)	32	93.562.500	2.994.000.000
Dukungan Manajemen	Gedung kantor	1	20.000.000.000	20.000.000.000
	Mobil	4	400.000.000	1.600.000.000
	Sepeda Motor	4	25.000.000	100.000.000
	Alat Olah Data	10	20.000.000	200.000.000
	Peralatan Kehumasan dan Protokol	1	100.000.000	100.000.000
JUMLAH				38.816.400.000

b. Bidang Pengawasan

1. Data pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika

a) Data tahun 2022

- Informasi Intelijen yang terungkap menjadi Peta Jaringan: 3 peta jaringan
- Kasus Tindak Pidana Narkotika yang terungkap dari Informasi Intelijen: 8 LKN
- Jumlah Tersangka: 17 Tersangka
- Jumlah Barang Bukti :Shabu: + 79.629,9 Gram, Ganja : + 74,5 Gram
- TAT: 51

b) Data tahun 2023 :

- Informasi Intelijen yang terungkap menjadi Peta Jaringan : 1 peta jaringan
- Kasus Tindak Pidana Narkotika yang terungkap dari Informasi Intelijen : 9 LKN
- Jumlah Tersangka : 8 Tersangka

- Jumlah Barang Bukti : Shabu : + 7.176,5 Gram, Extacy 70 butir, Ganja 1004,1 gr
- TAT : 34

2. Usulan pembentukan BNNK baru

- a) Kabupaten Ketapang
- b) Kabupaten Sambas
- c) Kabupaten Kapuas Hulu
- d) Kabupaten Melawi

3. Upaya P4GN di perbatasan dan daerah rawan peredaran narkotika

- a) Optimalisasi Pos Interdiksi terpadu di Kec. Entikong Kab. Sanggau
- b) Sinergitas bersama dengan Pamantas TNI AD, Polri, dan Bea Cukai
- c) Membentuk Relawan Anti Narkotika di setiap Desa khususnya wilayah perbatasan
- d) Bersama Kejati dan instansi terkait membentuk Balai Rehab Adiyaksa
- e) pembangunan Balai Rehabilitasi Pemerintah dan Masyarakat (Komponen Masyarakat)
- f) Mendorong dan mengusulkan Pembentukan BNNK Baru di Kab wilayah Perbatasan
- g) Memaksimalkan peran para Dokter, Psikolog dan perawat Pemerintah Daerah yg sdh dilatih untuk mampu merehabilitasi minimal pada layanan Rawat Jalan dengan dorongan dari Pemerintah Daerah

4. Restorative Justice

- a) Dalam implementasi pelaksanaan RJ, BNNP Kalimantan Barat melaksanakan kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi dan Pemerintah Daerah melalui program Rehabilitasi dengan membangun Balai Rehabilitasi Adiyaksa sebagai sarana pelaksanaan RJ.
- b) Bersama Kejati dan instansi terkait membentuk Balai Rehab Adiyaksa.

C. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan laporan data dan informasi dari seluruh rangkaian kegiatan Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI pada reses Masa Persidangan V Tahun 2022-2023 ke Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah terurai di atas dan berbagai titik fokus diskusi yang terjadi antara Tim dan Para Mitra Kerja di daerah Provinsi Kalimantan Barat maka terdapat beberapa pokok penting yang perlu diperhatikan yakni sebagai berikut:

1. Komisi III DPR RI mengapresiasi kinerja Polda Kalimantan Barat, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Kanwil Kalimantan Barat Kemenkumham, Pengadilan Tinggi Pontianak, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, Pengadilan Militer I-05 Pontinak dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Barat dan menerima penjelasan terkait kendala yang dihadapi.
2. Komisi III DPR RI memintapara Mitra Kerja Komisi III DPR RI di Provinsi Kalimantan Barat untuk mengoptimalkan anggaran yang ada dalam mencapai target kinerja, serta akan menindaklanjuti kendala dan usulan kebutuhan yang telah disampaikan kepada para Mitra Kerja Komisi III DPR RI di pusat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Komisi III DPR RI akan memperjuangkan pembiayaan untuk mengatasi kendala dalam melakukan pengawasan terhadap lalu lintas orang dengan melakukan pembangunan sarana dan prasarana keimigrasian mengingat imigrasi merupakan garda terdepan dalam mencegah masuknya tenaga kerja asing.
4. Kanwil Kumham agar melakukan pendampingan terhadap Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah agar meningkatkan peraturan yang memiliki unsur-unsur HAM, agar di Kalimantan Barat memiliki wawasan perspektif HAM.
5. Minimnya anggaran pada Lapas narkoba Komisi III DPR RI akan memberikan perhatian serius terkait minimnya anggaran untuk Tingginya kasus narkoba di Kalimantan Barat.
6. Komisi III DPR RI prihatin dengan masih kurangnya anggaran di setiap lingkungan peradilan di Provinsi Kalimantan Barat, termasuk masih kurangnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana, oleh karena itu akan diperjuangkan. Usulan untuk segera dicabut moratorium mengenai pembangunan gedung-gedung pengadilan menjadi perhatian Komisi III DPR RI.
7. Amanat dari Pasal 25 UU Peradilan Umum mengenai kesejahteraan Hakim hingga saat ini belum direalisasikan, begitu juga tunjangan perumahan masih kurang.
8. Kebijakan restorative justice di Kalimantan Barat jangan sampai dimanfaatkan oleh penegak hukum untuk disalahgunakan.
9. Daerah-daerah yang belum ada Kejaksaan Negeri, akan menjadi perhatian Komisi III DPR RI.
10. Dalam melakukan pencegahan terhadap narkoba, agar lebih baik banyak dilakukan Kerjasama dengan kementerian/Lembaga terkait. Anggaran yang ada difokuskan pada penindakan atau pemberantasan narkoba.
11. Terkait dengan masih kurangnya kapal Pol Air di wilayah hukum Polda Kalimantan Barat, akan menjadi perhatian serius oleh Komisi III DPR RI.

Demikian Laporan Hasil Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Kalimantan Barat untuk dapat menjadi masukan bagi Pimpinan DPR dalam mengambil keputusan.

**Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses
Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023**

**PIMPINAN KOMISI III DPR RI
WAKIL KETUA,**

**Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M.
A-514**